



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KECAMATAN GUNUNGJATI TAHUN 2023**

**KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaantugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Gunungjati,            Februari 2024

**Camat Gunungjati,**

**H. ABDUL AJID, S.Sos.**  
**NIP. 19690823 199009 1 001**

## **Ikhtisar Eksekutif**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Gunungjati yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Gunungjati yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dengan Indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan. Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 78,00%

Setelah Tujuan ditetapkan maka sasaran yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Gunungjati dalam mencapai target kinerja ada sebagai berikut:

Sasaran OPD 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 81,50%

Sasaran OPD 2: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan indikatornya Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 70,00%.

Sasaran OPD 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 0,80 Poinit

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

- a.** Sasaran Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 93,69%.
- b.** Sasaran Program 2: diantaranya:
  - 1.** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 99,89%.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikatornya Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 99,88%.
  3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan indikatornya Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan.persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 99,89%.
- c. Sasaran Program 3 : Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indicator Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2023 adalah 0.00 %, Karna program ini tidak didukung dengan anggaran.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Gunungjati ke depan, sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Gunungjati harus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Masih belum menguasai Aparatur pemerintah Desa tentang Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes yang tepat waktu.
3. Masih belum tertibnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, baik anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, serta Pendapatan Asli Desa.
4. Masih belum tertibnya penataan Aset Desa.
5. di Kecamatan Gunungjati ada 10 Desa, 4 Desa berstatus Desa Mandiri dan 5 Desa bersatus maju dan 1 Desa bersatus berkembang, hal ini menjadikan motivasi untuk Kecamatan Gunungjati agar bisa menaikan status Desa diwilayah Kecamatan Gunungjati menjadi desa mandiri.

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	4
1.3 Isu-isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	7
1.6 Keuangan	9
1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
<b>BAB 2 PERENCANAAN &amp; PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>19</b>
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	32
2.1.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	32
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	35
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	36
2.3.1 Target Belanja Kecamatan Gunungjati	36
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	37
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>38</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	38
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	38
3.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	40
3.2.2 Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	45
3.2.3 Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	50
3.3 Realisasi Anggaran	54
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	<b>55</b>

## **BAB 1 PENADAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Gunungjati.
2. Mendorong Kecamatan Gunungjati didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Gunungjati untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Gunungjati di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **1.1 Struktur Organisasi**

Kecamatan Gunungjati dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

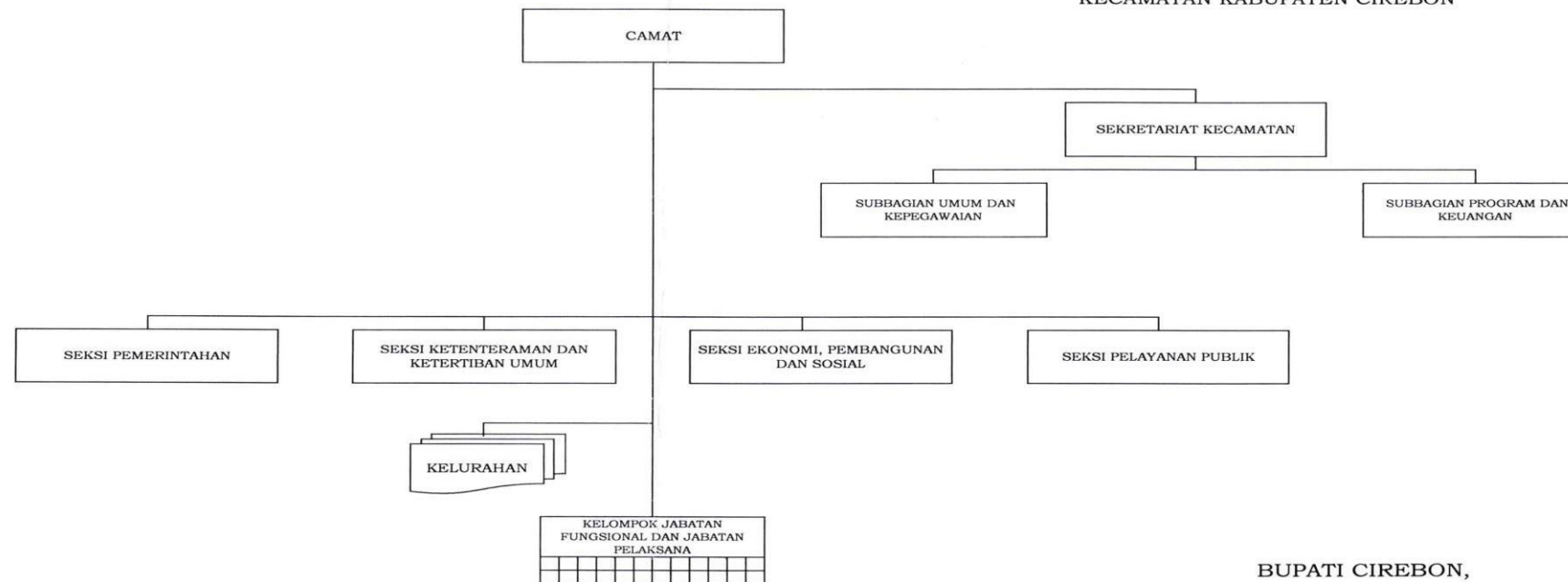
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Gunungjati, terdiri atas;

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial
6. Seksi Pelayanan Publik
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
8. Kelurahan / Desa

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
 NOMOR : 159 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 KECAMATAN KABUPATEN CIREBON



Diundangkan di Sumber  
 pada tanggal 14 Desember 2023  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,  
  
 HILMY RIVA'I  
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 159

BUPATI CIREBON,  
 Ttd  
 IMRON



## **1.2. Fungsi dan Tugas**

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

### **1. Fungsi**

- 1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
  - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
  - i. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;

### **2. Tugas**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

### **1.3 Isu-isu Strategis**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Gunungjati, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Kurangnya Luasan

#### Ruang Terbuka Hijau

2. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur desa
4. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas
5. Pemutakhiran data penerima bantuan yang kurang akurat
6. Kurangnya pegawai yang berstatus PNS di Kantor Kecamatan Gunungjati

#### 1.4 Keadaan Pegawai

Pegawai Kecamatan Gunungjati berjumlah sebanyak 13 orang Pegawai Negeri Sipil, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel Distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Jabatan  
Tahun 2023

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	S1	1	-
2	Sekretaris Camat	1	S2	-	1
3	Kepala Seksi	4	S1	2	2
4	Kepala Sub Bagian	2	S1	2	-
5	Staf/Pelaksana	4	SMA	3	1
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Gunungjati Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Master (S2)	-	1	1
2	Sarjana (S1)	5	2	7
3	Diploma (D3/D4)	-	-	-
4	SLTA	3	1	4
5	SMP	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Tabel Distribusi Tenaga Non PNS Kecamatan Gunungjati Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	-	2	2
2	Diploma (D3/D4)	-	1	1
3	SLTA	3	1	4
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Pangkat/Golongan di Kecamatan Gunungjati Tahun 2023

NO	GOLONGAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	IV B	1	1	2
2	IV A	-	-	-
3	III D	3	1	4
4	III C	1	1	2
5	III B	-	1	1
6	III A	-	-	-
7	II D	2	-	2
8	II C	1	-	1
9	II B	1	-	1
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

### 1.5 Kadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Gunungjati memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran diantaranya :

Data Sarana/Prasarana Milik Kecamatan Gunungjati Tahun 2023

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung Kantor		1	-	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	-	-	-	-
3	Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	41	41	-	-
4	Lemari Besi/Metal.	3	3	-	-
5	Rak Besi.	1	1	-	-
6	Filing Cabinet Besi.	9	9	-	-
7	CCTV - Camera Control Television System.	1	1		-
8	Papan Visual/Papan Nama.	1	1	-	-
9	Alat Penghancur Kertas.	1	1	-	-
10	Mesin Absensi	1	1	-	-

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
11	LCD Projector/Infocus.	2	2	-	-
12	Papan Nama Instansi.	1	1	-	-
13	Papan Pengumuman	1	1	-	-
14	Meja Kerja Kayu.	4	4	-	-
15	Meja Rapat.	2	2	-	-
16	Meja Podium.	1	1	-	-
17	Meja 1/2 Biro.	1	1	-	-
18	Filling Kabinet	11	11	-	-
19	Kursi Rapat.	24	24	-	-
20	Kursi Tamu.	3	3	-	-
21	Kursi Putar.	3	3	-	-
22	Bangku Tunggu.	3	3	-	-
23	Kursi Lipat.	1	1	-	-
24	Sofa	1	1	-	-
25	Mesin Pemotong Rumput.	2	2	-	-
26	Lemari Es.	1	1	-	-
27	AC Split.	8	8	-	-
28	Kipas Angin.	1	1	-	-
29	Televisi	2	2	-	-
30	Sound System.	1	1	-	-
31	Tiang Bendera.	-	-	-	-
32	Tangga Aluminium.	1	1	-	-
33	Dispenser.	1	1	-	-
34	Meja Kerja Pejabat Eselon IV.	3	3	-	-
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV.	3	3	-	-
36	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis.	6	6	-	-
37	Microphone/Wireless MIC.	1	1	-	-
38	Pesawat Telephone.	1	1	-	-
39	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum).	1	1	-	-
40	PC Unit.	7	7	-	-
41	Lap Top.	4	4	-	-
42	Note Book.	2	2	-	-

No	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	9	-	-
44	Scanner (Peralatan Personal Komputer).	1	1	-	-
45	Modem.	1	1	-	-
46	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-
47	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen.	1	1	-	-
48	Taman Semi Permanen.	1	1	-	-
49	Ilmu Pengetahuan Umum.	71	71	-	-
50	Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi.	12	12	-	-
51	Ilmu Politik.	55	55	-	-
52	Hukum	54	54	-	-
53	Teknologi	69	69		
54	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Art Original)	2	2		

## 1.6 Keuangan

Kecamatan Gunungjati melaksanakan 2 (dua) program anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh (20) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.638.793.200,- dengan capaian realisasi sebesar Rp.2.349.502.973,- (89,04%) dan sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp.289.290.227,- (10,96%) yang merupakan sisa.

Sementara itu Program Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui Empat (4) Program Kegiatan, dengan Tujuh (7) Kegiatan, dan Delapan (8) Sub Kegiatan dengan ditunjang anggaran sebesar Rp. 424.741.500,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 407.621.300,- sisa sebesar Rp. 17.120.200,- atau tercapai sebesar 95,97%. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Belanja Operasional dan Modal Pemerintahan yang diselenggarakan pada Kecamatan Gunungjari terinci sebagaimana tabel berikut:

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.363.635.100	2.080.928.973	88,04
	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	6 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.299.400	1.299.400	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	441.400	441.400	100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	858.000	858.000	100%
	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.214.051.700	1.941.881.673	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	14 Pegawai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.212.646.100	1.940.476.073	87,70
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	491.000	491.000	100%
	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanana/triwulan dan semester	18 Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	914.600	914.600	100%

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Jumlah laporan administrasi umum tingkat kecamatan	11 Laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.278.800	33.223.300	96,92
	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.189.700	1.189.700	100,00
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.429.000	10.429.000	100,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.696.200	2.684.700	99,57
	Jumlah Paket Media/koran yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.460.000	97,33
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Bahan/Material	12.664.300	11.660.300	92,07
	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	100
	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.299.600	1.299.600	100
	Jumlah laporan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.440.100	24.302.750	79,84

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.082.200	17.944.850	74,51
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.357.900	6.357.900	100
	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.565.100	80.221.850	96,00
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.671.000	35.815.000	92,61
	Jumlah kendaraan dinas jabatan beroda 4 yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.786.000	4.298.750	89,82
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.108.100	40.108.100	100
	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	142.794.400	142.710.500	99,94



Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	31.618.600	31.618.500	100,00
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.499.800	22.499.800	100,00
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	7 Laporan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.118.800	9.118.700	100,00
	Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	41.525.200	41.525.200	100,00
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.525.200	41.525.200	100,00
	Jumlah laporan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	69.650.600	69.566.800	99,88

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	69.650.600	69.566.800	99,88
	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	100 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	49.416.100	42.935.900	86,89
	Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Laporan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.416.100	42.935.900	86,89
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	4 Laporan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.416.100	42.935.900	86,89
	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	100 %	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	78.888.800	78.868.800	99,97
	Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Laporan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	30.000.000	100,00
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	30.000.000	30.000.000
Jumlah laporan kegiatan Koordinasi Penerapandan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		4 Laporan	Koordinasi Penerapandan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.888.800	48.868.800	99,96

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia	3 Laporan	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48.888.800	48.868.800	99,96
			<b>Jumlah</b>	<b>2.363.635.100</b>	<b>208.0928.973</b>	<b>88,04</b>

## **1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **Ringkasan Eksekutif memuat:**

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor tersebut sasaran dapat dicapai lebih

optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Memasuki Tahun 2023, Kecamatan Gunungjati menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra Kecamatan Gunungjati merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Gunungjati dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014-2019).

##### **3.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi dan Misi Kepala Daerah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019- 2024, berikut ini adalah Tabel Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024:

**Visi Misi Kepala Daerah Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024**

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN</b>										
1	<b>MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG MENJUNJUNG TINGGI DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA, TRADISI DAN ADAT ISTIADAT</b>									
1.1		<b>Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon</b>	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan/total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	81,00 Persen	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	86,00
1.1.1		Meningkatnya jatidiri dan nilai- nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	255,00 Kelompok	232,00	257,00	258,00	259,00	260,00	260,00
2	<b>MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI</b>									

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1		<b>Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,69 Poin	68,75	69,53	70,42	71,01	71,59	71,59
2.1.1		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	6,71 Tahun	6,92	7,05	7,18	7,31	7,44	7,44
			Harapan Lama Sekolah (HLS) Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	12,24 Tahun	12,25	12,34	12,44	12,53	12,63	12,63



No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH) Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	71,82 Tahun	71,99	72,11	72,24	72,36	72,48	72,48
2.2		Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	9,94 Persen	11,24	11,14	11,04	10,94	10,84	10,84
			Tingkat Penangguran Terbuka (TPT)	10,35 Persen	11,52	11,12	10,70	10,30	9,90	9,90
			PDRB Per Kapita	22,41 Juta	22,43	23,25	24,95	26,78	28,74	28,74
2.2.1		Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	1,50 Persen	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	2,30

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.2.2		Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja $\frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{100\% \text{ Jumlah Angkatan Kerja}}$	58,66 Persen	56,44	57,22	58,03	58,83	59,64	59,64
3	<b>MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG SENANTIASA MENERAPKAN NILAI AGAMA, BUDI PEKERTI, SANTUN, DAN BERETIKA</b>									
3.1		<b>Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama</b>	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	75,00 Poin	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00
3.1.1		Meningkatnya penyelesaian gesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi / Gesekan Antar Umat Beragama	78,00 Persen	78,00	80,00	81,00	82,00	83,00	83,00
4	<b>MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH</b>									

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1		<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</b>	Indeks Gini Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	0,34 Poin	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33	0,33
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya)/ PDRB tahun sebelumnya X 100%	4,86 Persen	-1,08	4,38	4,61	4,84	5,08	5,08
			Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	10.670,00 Ribu Rupiah / Kapita / Tahun	10.342,00	10.606,00	10.891,00	11.198,00	11.529,00	11.529,00
4.1.1		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	-1,05 Prosen	1,76	1,86	2,08	2,31	2,54	2,54

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	2,28 Persen	-0,42	3,08	3,74	4,41	5,07	5,07
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	4,62 Persen	-7,00	5,00	5,25	5,50	5,75	5,75

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	5,47 Persen	-9,05	4,33	4,63	4,93	5,23	5,23
4.1.2		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	71,17 Poin	7,44	71,71	71,98	72,25	72,52	72,52
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Konsumsi energi masing-masing kelompok pangan/Angka Kecukupan Energi X 100	91,50 Prosen	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40	93,40

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.3		Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik) Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	77,99 Poin	79,89	79,46	80,20	80,93	81,67	81,67

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.4		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH) Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	52,51 Poin	52,29	52,67	52,76	52,84	52,92	52,92
4.2		<b>Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	50,58 Indeks	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
4.2.1		Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah Jumlah PAD/Jumlah pendapatan daerah x 100%	15,71 Poin	16,24	16,79	17,36	17,95	18,56	18,56

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	3,25 Poin	3,27	3,65	3,35	3,40	3,50	3,50
4.2.2		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	68,00 Poin	70,00	73,00	76,00	79,00	80,00	80,00
			Opini BPK terhadap LKPD Hasil penilaian dari BPK RI	1,00 WTP	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Hasil penilaian dari Korsupgah KPK RI	60,00 Poin	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00



No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.2.3		Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Hasil penilaian dari Kemen-PAN RB	2,63 Poin	2,78	2,93	3,08	3,23	3,38	3,38
4.2.4		Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	2,00 Desa	5,00	28,00	49,00	70,00	91,00	91,00
5	<b>MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM UNTUK MEWUJUDKAN KONDUSIVITAS DAERAH GUNA Mendukung terciptanya stabilitas nasional</b>									
5.1		<b>Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat</b>	Indeks ketertiban dan ketentraman lingkungan	53,05 Persen	53,05	56,09	64,12	70,59	77,50	77,50
5.1.1		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	0,00 Kasus	403,00	398,00	393,00	388,00	383,00	383,00

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.1.2		Menurunnya resiko bencana	Indek resiko bencana Hasil penilaian dari BNPB	165,44 Poin	160,08	154,72	149,36	144,00	138,64	138,64

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024)

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Gunungjati mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa dengan indikator capaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

### 3.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Gunungjati yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, danberkesinambungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telahditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gunungjati selama 5 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

#### Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2020-2024.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	82,00	85,00	87,00	87,00	87,00
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	70,10	70,20	70,30	70,40	70,50
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Persen	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00
1.1.3.		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	point	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

### 3.1.3. Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi

Strategi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Bahan/Material
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	<b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban</b>	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

	<b>Umum di Kecamatan</b>	Publik		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.	<b>Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada bawahannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Gunungjati pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA	
				Satuan	Target
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	87,00
1.1.1.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	70,40
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	70,00
1.1.3		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Point	0,70

Seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Gunungjati melakukan perubahan perjanjian kinerja pada Tahun 2023 yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA			REALI SASI
				Satuan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	Persen	87,00	87,00	87.00

1.1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	70,40	70,40	71.00
1.1.2		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	70,00	70,00	70.00
1.1.3		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Point	0,70	0,70	0.78

## 2.3 . Rencana Anggaran Tahun 2023

### 2.3.1. Target belanja Kecamatan Gunungjati

Pada Tahun Anggaran 2023, KECAMATAN GUNUNGGJATI mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp.2.638.793.200,- dengan realisasi sejumlah Rp.2.349.502.973,- atau 89.04%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp.289.290.227,-. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2023.

### Pendapatan dan Belanja KECAMATANGUNUNGJATI Tahun Anggaran 2023

KODE REK	Uraian	DPA	LRA
5.	BELANJA DAERAH	2.638.793.200	2.349.502.973
5.1.	BELANJA OPERASI	2.628.364.200	2.339.073.973
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.212.646.100	1.940.476.073
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	415.718.100	398.597.900
5.2.	BELANJA MODAL	10.429.000	10.429.000
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.429.000	10.429.000

### 2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel : Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	2,367,693,900.00	89,59	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	271,099,300.00	10,26	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3.	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	4.058.800,00	0,15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa



## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja tahun 2023 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Kecamatan Gunungjati. dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	75 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Gunungjati dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gunungjati beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut:

**Tabel Capaian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Persen	70.40	71.00	100,85
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	Persen	100	99,55	99,55
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Persen	70.00	70.00	100%
4	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	Persen	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
6	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	Persen	100	100	100
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	Persen	0	0	0
8	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Ponit	0.70	0.78	111,29%
9	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persen	0	0	0

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) sasaran kinerja yang indikatornya telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (100,00%) yaitu Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, Sementara itu, terdapat 2 (dua) sasaran kinerja lainnya melebihi target. Keberhasilan melebihi target dalam Indikator Indeks Desa membangun tidak terlepas dari bimbingan dan Fasilitasi peran Kecamatan Gunungjati dalam membina Desa, dimana pada Tahun 2023 ada 3 Desa di Wilayah Kecamatan Gunungjati yang berstatus desa Mandiri, diantaranya Desa Jatimerta, Desa Astana, Desa Mayung.

Selain itu terdapat terdapat 6 (Enam) sasaran Program dimana 4 (empat) program mempunyai target Kinerja dan anggaran dan 2 (dua) program tidak mempunyai target kinerja dan anggaran, 4 (empat) program yang mempunyai target kinerja dan anggaran mempuntai tingkat capaian kinerja  $\pm$  100 % dengan katagori sangat baik.

### 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Gunungjati yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### 3.2.1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik menggunakan Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur tingkat Kepuasan masyarakat dalam pelayanan yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan cara ini, masyarakat diberikan kesempatan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diselenggarakan suatu unit kerja. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. dalam konteks pembangunan sistem administrasi Negara. Reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. di bawah ini adalah Grafik Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Kecamatan Gunungjati dari Tahun 2020 - 2023. dimana salah

satu indikator sasaran kinerja yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.



Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel : Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2022	2023		% Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku	70,30%	70,40%	71,00%	100,85%

Dari table diatas diperoleh angka kenaikan sasaran setrategis dari Tahun 2022 dengan angka capaian kinerja 70.30 % dan meningkat pada Tahun 2023 dengan angka capaian 71.00% yang melebihi target kinerja pada Renstra KecamatanGunungjati Tahun 2019-2024.

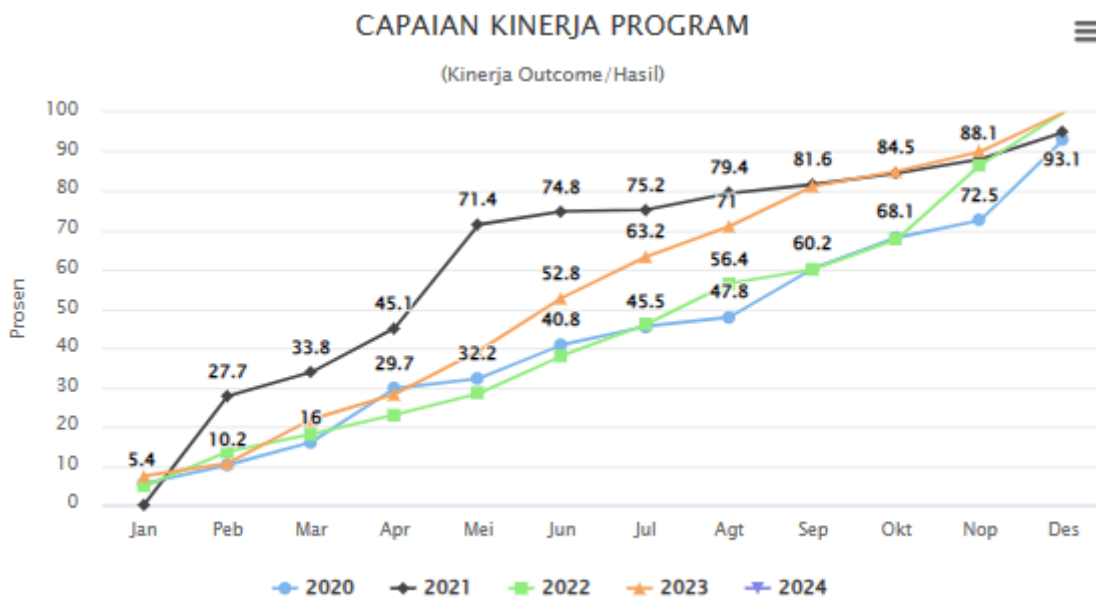
### Indikator Program

Indikator Kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah Rumus indikator kinerja Program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Pelayanan yang disediakan}}{\text{Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\text{Realisasi} = \frac{15 \text{ Layanan}}{15 \text{ layanan}} \times 100\%$$



Dukungan untuk tercapainya kinerja Sasaran 1 diperoleh dari indikator kinerja program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah. Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 100%.

**Faktor Pendorong:**

1. Adanya Sumberdaya Aparatur yang bisa mengarahkan Pemohon Pelayanan untuk mengisi IKM.
2. Perubahan Ruang Pelayanan Umum yang lebih Respentatif.

**Faktor Penghambat:**

1. Kurangnya sarana dan pra sarana pelayanan seperti ( Komputer, Printer, Kursi tunggu pemohon, CCTV dan lain lain)
2. Terbatasnya jumlah petugas pelayanan umum.
3. Blanko E KTP elektronik yang sering habis

**Solusi:**

1. Menganggarkan belanja untuk sarana dan prasarana pelayanan umum
2. Mengusulkan tambahan petugas perbantuan dari Disdukcapil untuk meningkatkan pelayanan umum.
3. Membuat permohonan pendistribusian blangko E-KTP kepada Disdukcapil Kabupaten Cirebon.

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 1 (satu) di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut

merupakan tabel analisa efisiensi penggunaan sumber daya :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target Rp	Realisasi Rp	%	
Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	99,55	99,55	2,363,635,100	2,080,928,973	88,04	Efisien
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100	1.299.400	1.299.400	100	Efisien
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100	2.214.051.700	1.941.881.673	87,70	Efisien
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Laporan	11 Laporan	100	34.278.800	33.223.300	96,92	Efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	30.330.100	24.302.750	80,12	Efisien
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	83.565.100	80.221.850	95,99	Efisien



Gambar, Foto Pelayanan Umum kecamatan Gunungjati Tahun 2023

### 3.2.2 Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan – Indikator Sasaran Kinerja 2

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan letak dan kondisi geografis daerah perlu memaksimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik Kecamatan mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mempunyai peran :

1. Mengevaluasi Peraturan Desa : Rancangan Peraturan APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Camat mempunyai waktu 20 hari terhitung sejak diterimanya Perdes untuk dievaluasi.
2. Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya Perdes.
3. Menjaga Kondusifitas wilayah di Kecamatan
4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 4.

Camat juga melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyelarasan dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurang-kuangnya : RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, RTRW Kabupaten, Rincian RTRW Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

#### **Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan**

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan.	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah kewenangan yang dilaksanakan x 100 persen.

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2022	2023		% Capaian
			Target	Realisasi	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah kewenangan yang dilaksanakan x 100 persen.	65,00 %	70,00 %	70,00 %	100 %

Capaian indikator kinerja Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Tahun 2023 mengalami kenaikan bilan di bandingkan dengan tahun 2022, hal ini sesuai dengan target pada Renstra kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024, kenaikan capaian kinerja tersebut didukung dengan capaian kinerja program yang rata-rata capaiannya 100% pada Tahun 2023, berikut adalah data capaian kinerja program.

### Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan terdiri dari 4(empat) program yang sudah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis kecamatan Gunungjati tahun 2019-2024, program tersebut diantaranya :

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Direncanakan}} \times 100\%$
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang dilakukan	$\frac{\text{jumlah pemberdayaan desa (desa mandiri)}}{\text{jumlah total desa sekecamatan}} \times 100\%$
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	$\frac{\text{jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di laksanakan}}{\text{jumlah kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang di rencanakan}} \times 100\%$
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	$\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang ditugaskan}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum seluruhnya}} \times 100\%$

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 2 (dua) didukung oleh 4 (empat) program yaitu dan 6 (enam) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efisiensi penggunaan sumber daya :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target Rp	Realisasi Rp	%	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	100	100 %	142.794.400	142.710.500	99,94	Efisien

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target Rp	Realisasi Rp	%	
Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	31.618.600	31.618.600	100	Efisien
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	41.525.200	41.525.200	100	Efisien
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	4 Laporan	100 %	69.650.600	69.566.800	99,88	Efisien
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	49.416.100	42.935.900	86,89	Efisien
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Laporan	3 Laporan	100 %	49.416.100	42.935.900	86,89	Efisien
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	78.888.800	78.868.800	99,97	Efisien
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Laporan	3 Laporan	100 %	30.000.000	30.000.000	100	Efisien
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100 %	48.888.800	48.868.800	99,96	Efisien

Ada beberapa Faktor Dalam rangka menunjang indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gunungjati pada Tahun 2023 diantaranya:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Undang–Undang yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Adanya Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang di Kelola oleh Pemerintah Desa
3. Adanya Aset Desa yang bisa dikelola sebagai Pendapatan Asli Desa

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Aparatur Desa
2. Aparatur di desa banyak yang belum memahami Peraturan tentang



Penyelenggaran Pemerintahan Desa

3. Tidak tertibnya Pencatatan Administrasi Aset Desa.

Tindak Lanjut:

1. Rekrutmen Aparatur Pemerintahan Desa harus diutamakan bagi perangkat desa yang mempunyai pengetahuan dan mempunyai keahlian dalam administrasi perkantoran.
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pertuaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Pembinaan dan Fasiltasi tentang Pencatatan Aset Desa.

### 3.2.3 Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat – Indikator Kinerja Sasaran 3

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni :

1. Indeks Ketahanan Sosial,
2. Indeks Ketahanan Ekonomi dan
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks desa Membangun, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa

Kecamatan Gunungjati dalam hal ini sangat berperan penting dalam menentukan status desa, pada Tahun 2023 Kecamatan Gunungjati ada 3 (Mandiri) Desa yang berstatus mandiri, dan 12 (dua belas) Desa yang berstatus maju dengan indeks rata-rata desa membangun (IDM) 0,7795 atau dengan kategori Maju.

**Tabel : Progres Indeks Desa Membangun Kecamatan Gunungjati 2023**

KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	VERIFIKASI			STATUS	IKS 2023	IKE 2023	IKL 2023	NILAI IDM 2023	STATUS IDM 2023	Rata rata IDM Kec	Status IDM Kec
				KEC	KAB	PROV								
320921	GUNUNG JATI	3209212001	ADIDHARMA	1	1	0	verified	0.8743	0.7667	0.8	0.8137	MAJU	0.7795	maju
320921	GUNUNG JATI	3209212002	PASINDANGAN	1	1	0	verified	0.8171	0.6833	0.8	0.7668	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212003	JADIMULYA	1	1	0	verified	0.88	0.9333	0.6	0.8044	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212004	KLAYAN	1	1	0	verified	0.84	0.7833	0.8	0.8078	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212005	JATIMERTA	1	1	0	verified	0.8743	0.7333	0.8667	0.8248	MANDIRI		
320921	GUNUNG JATI	3209212006	ASTANA	1	1	0	verified	0.8686	0.8167	0.8	0.8284	MANDIRI		
320921	GUNUNG JATI	3209212007	KALISAPU	1	1	0	verified	0.8229	0.8167	0.8	0.8132	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212008	WANAKAYA	1	1	0	verified	0.84	0.8	0.8	0.8133	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212009	GROGOL	1	1	0	verified	0.7257	0.65	0.8667	0.7475	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212010	BABADAN	1	1	0	verified	0.8629	0.6833	0.6	0.7154	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212011	BUYUT	1	1	0	verified	0.84	0.65	0.8	0.7633	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212012	MAYUNG	1	1	0	verified	0.8571	0.7333	0.8667	0.819	MANDIRI		
320921	GUNUNG JATI	3209212015	MERTASINGA	1	1	0	verified	0.8229	0.7	0.6667	0.7298	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212016	SAMBENG	1	1	0	verified	0.84	0.6833	0.6667	0.73	MAJU		
320921	GUNUNG JATI	3209212017	SIRNABAYA	1	1	0	verified	0.7943	0.6833	0.6667	0.7148	MAJU		

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2022	2023		% Capaian
			Target	Realisasi	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	0.770 Poin	0.700	0.780	111,3 %

IDM Kecamatan Gunungjati pada tahun ke tahun mengalami kenaikan, data tersebut di dapatkan dari pendamping desa yang bertugas di desa se wilayah kecamatan Gunungjati dimana pada Tahun 2023 taget 0.700 poin tercapai 0.780 poin dengan angka capaian 111,3% dan masuk dalam kategori di tingkat kecamatan dengan katagori maju.

Kategor Desa bisa masuk kategori mandiri memiliki nilai IDM >0,8155. Desa maju memiliki nilai IDM ≤0,8155 dan >0,7072. Lalu, desa berada di kategori berkembang jika memiliki skor IDM ≤0,7072 dan >0,5989. Desa yang memiliki IDM ≤0,5989 dan >0,4907 termasuk dalam kategori tertinggal.

Pada Tahun 2023 indikator Kinerja sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) tidak didukung oleh anggaran dan tidak mempunyai target kinerja, hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang telah di tetapkan, dengan komitmen dari pegawai kecamatan Gunungjati sehingga target kinerja tersebut bisa tercapai secara keseluruhan desa yang ada diwilayah kecamatan Gunungjati IDM Kecapatan Gunungjati memperoleh nilai 0,7904 dengan kategori maju. hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor.

Ada beberapa Faktor dalam rangka menunjang indikator sasaran Indeks Desa Membangun di Kecamatan Gunungjati pada tahun 2023 diantaranya: Faktor Pendorong:

1. Kecamatan Gunungjati di tetapkan sebagai pusat kegiatan lokal daripemerintah kabupaten Cirebon
2. Adanya Pendamping Desa di setiap desa untuk menilai status Desa
3. Koordinasi yang yang baik antara Pemerintahan Desa dengan Kecamatan

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
2. Rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Desa membangun
3. Kurangnya dukungan masyarakat tentang pemberdayaan di desa

Tindaklanjut :

1. Mengadakan Bimbingan Teknis tentan Desa Membangun
2. Peningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Musrenbang

- ditingkat kecamatan
- Mendorong Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur di desa.

### Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Indeks Desa Membangun terdiri dari 1 (satu) program yang sudah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis kecamatan Gunungjati tahun 2019-2024, program tersebut adalah:

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan}}{\text{Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang direncanakan}} \times 100$

Pada Tahun 2023 Indikator kinerja peningkatan prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa tidak didukung oleh anggaran, hal ini semata mata karna selahan dari perencanaan pada Tahun 2023.

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	0	0 %	0	0	0	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Laporan	0 Laporan	0 %	0	0	0	

### 3.3 Realisasi Anggaran Kecamatan Gunungjati Tahun 2023

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2023 sebesar Rp2.648.476.549,00 atau 94,25% dari total anggaran Rp2.810.160.726,00 Realisasi anggaran tersebut didalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Anggaran belanja apabila di rinci antara belanja gaji dan non gaji yaitu anggaran gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp2.292.111.900,00 sedangkan anggaran non gaji sebesar Rp518.048.826,00. Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp2.132.089.509,00 atau % capaian 93,02%. Realisasi belanja Non Gaji sebesar Rp514.287.040 atau dengan % capaian 99,28%.

Anggaran untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan di akomodir oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp2.559.910.126,00 dengan realisasi anggaran sebesar 2.398.505.729,00 atau tercapai 93,69%.

Anggaran untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan di akomodir oleh program di antaranya :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp142.794.400,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp142.710.500,00 atau tercapai 99,94%
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.416.100,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp42.935.900,00 atau tercapai 86,89%
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp78.888.800,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp78.888.800,00 atau tercapai 99,97%
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.058.800,00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp4.058.800,00 atau tercapai 100%

Anggaran untuk sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggran Rp0,00 dengan realisasi anggran Rp0,00 atau tercapai 0,00 %

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penyelenggaraan kegiatan pada Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 merupakan tahun ke -4 (empat) dari Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024, Keberhasilan yang di capai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 3 sasaran, yaitu yang pertama Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan indikatornya Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 71%, yang kedua Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan indikatornya persentase jumlah pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan umum dan ketertiban umum yang dilaksanakan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 adalah 70 %, dan yang ketiga Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikatornya Indeks Desa Membangun (IDM), Persentase capaian kinerja sampai denganakhir Bulan Desember 2023 adalah 0.78 poin.

### **4.2. Rencana Tindaklanjut**

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah- langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Umum kepada Masyarakat
2. Menganggarkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
3. Memperbaiki Bangunan / Gedung kantor
4. Meningkatkan kemampuan ASN melalui Bimtek atau Pelatihan
5. Memperbaharui SOP Pelayanan Umum
6. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Melaksanakan Pembinaan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Apartur Pemerintahan Desa
8. Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
10. Meningkatkan Keamanan di wilayah Kecamatan
11. Mendorong peningkatak Status Desa menjadi Desa Mandiri
12. Melakukan Pembinaan bagi Peserta MTQ tingkat Kabupaten
13. Memperkuat Fungsi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Kecamatan Gunungjati diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya LKIP Kecamatan Gunungjati ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Gunungjati untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan pada visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi.

Semoga LKIP Kecamatan Gunungjati diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

Gunungjati, Februari 2024

CAMAT GUNUNGGJATI,

**H. ABDUL AJID, S.Sos.**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19690823 199009 1 001**

